ANALISIS PENGARUH DANA BAGI HASIL PAJAK, DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Rudy Pudjut Harianto

STIE Madani Balikpapan

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of Funds for Tax Results, Funds for Results is not a Tax, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund toward of Local Government's Expenditure at East Borneo Province. Data Analyse method that used in this research are classical assumption test (normality, multicollinierity, heteroscedasticity, autocorrelation) and Multiple Linier Regression Analyse (correlation coeficient, determination coeficient, t test/significantion test). Accumulatively, coeficient correlation (R) = 1,000 so that it can be said that the independent variables toward dependent variable in this research can giving the very strength correlation. Result of determination coefficient (R^2) = 0,997 it can be said the independent variables can be explain the dependent variable of equal to 99,7% only. While the rest equal to 0,3% explained by other variable from outside model. The result of significantion test could be explained : (1) there are have a significant effect of Funds for Tax Results on Local Government's Expenditure; (2) there are have a significant effect of Funds for Results is not a Tax on Local Government's Expenditure; (3) and there aren't have a significant effect of General Allocation Fund on Local Government's Expenditure; (4) there are have a significant effect of Special Allocation Fund on Local Government's Expenditure.

Keywords : funds for tax results, funds for results is not a tax, general allocation fund, special allocation fund, local government's expenditure

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi tahun 1998 paradigma pembangunan di Indonesia telah bergeser dari model pembangunan yang sentralistik menjadi desentralistik. Pembagian kewenangan menjadi bagian dari arah kebijakan untuk membangun daerah yang dikenal dengan istilah kebijakan "Otonomi Daerah". Implikasi langsung dari kewenangan/fungsi yang diserahkan kepada Daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur perimbangan keuangan (hubungan keuangan) antara Pusat dan Daerah yang dimaksudkan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Peningkatan yang cukup signifikan pada transfer dana ke Daerah melalui Dana Perimbangan telah menyebabkan berkurangnya porsi dana yang dikelola Pemerintah Pusat, sebaliknya porsi dana yang menjadi tanggung jawab Daerah melalui APBD meningkat tajam. Perubahan peta pengelolaan fiskal ini juga disertai fleksibilitas yang cukup tinggi, atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan tersebut.

Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follow function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggungjawab Daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada.

Dana Perimbangan menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan menurut Pasal 10 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 terdiri atas :

1. Dana Bagi Hasil.
2. Dana Alokasi Umum (DAU).
3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Provinsi Kalimantan Timur sebagai daerah yang kaya akan hasil minyak dan gas bumi, pertambangan batu bara, serta hasil hutan, tentunya tidak terlepas dari kebutuhan akan Dana Perimbangan sebagaimana daerah lainnya di Indonesia. Apalagi kontribusi yang diberikan provinsi Kalimantan Timur sangat besar dari sektor tersebut di atas, belum lagi yang berasal dari Pajak Negara yaitu Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga sangat wajar bahwa Dana Perimbangan dibutuhkan guna membiayai pembangunan sarana dan prasarana yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya dari sumber Pendapatan Asli Daerahnya.

Berdasarkan keadaan tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Dana Perimbangan tersebut terhadap Belanja Daerah, dengan tema "Analisis Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur".

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan penelitian (research question) yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2014: 88). Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ?

2. Apakah Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara parsial mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ?

Untuk mencapai hasil yang diinginkan, maka suatu penelitian perlu dilakukan penelusuran bahwa target apa saja yang ingin dicapai dan sejauhmana dampak yang akan ditimbulkan dari penelitian tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

KERANGKA TEORI

Dana Bagi Hasil

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, bahwa Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak (Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan) dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam). Daerah yang memiliki kekayaan alam dan penghasilan pajak akan memiliki penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerahnya. Hasil dari pengelolaan sumber daya tersebut dialokasikan kepada daerah-daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dengan mengunakan prinsip *by origin* (daerah penghasil) serta melihat realisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Hal ini berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pusat kepada daerah. Transfer dari pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah

dengan leluasa dapat menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik.

Menurut Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinanya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009) :

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.

2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan di atas.

3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi :

1. Kriteria umum yaitu ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.

2. Kriteria khusus yaitu ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah.

3. Kriteria teknis yaitu ditetapkan oleh kementerian negara / departemen teknis.

Belanja Daerah

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah "Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih."

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menerangkan bahwa Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang- undangan.

Halim (2004) menyatakan bahwa, "belanja daerah adalah "pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai belanja daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan belanja daerah adalah belanja yang dikeluarkan oleh daerah yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali yang digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang akan mendukung pelaksanaan desentralisasi terutama dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

Hipotesis

Selanjutnya menurut Good dan Scates (1954) dalam buku statistika karya Suharyadi dan Purwanto (2009:81) menyatakan "bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan". Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena, jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori, dan belum menggunakan fakta. Menguji hipotesis penelitian berarti menguji jawaban yang sementara, apakah benar-benar terjadi atau tidak. Kalau terjadi berarti hipotesis penelitian terbukti, dan kalau tidak berarti hipotesis penelitian tidak terbukti.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka peneliti mengajukan hipotesis atau dugaan sementara sebagai berikut :

1. Diduga Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Diduga Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara parsial mempunyai pengaruh

signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini jenis penelitian yang dilakukan adalah secara kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis.

Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang akan diproses/diolah lebih lanjut oleh peneliti.

Tehnik Pengumpulan Data

Menurut Afifudin dan Saebani (2009:47) pengumpulan data merupakan proses pengumpulan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Studi Pustaka (*Library Research*) : pengumpulan data atau informasi dengan menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan bertujuan untuk menemukan teori, konsep, dan variabel lain yang dapat endukung penelitian. Di dalam metode studi pustaka ini, peneliti mencari data melalui referensi-referensi, jurnal dan artikel melalui internet.

2. Dokumentasi (*Documentation*) merupakan salah satu cara / tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memindahkan data yang diperoleh berupa dokumen dan catatan pada laporan keuangan perusahaan yang diperlukan, kemudian diolah menjadi hasil yang diinginkan.

Metode Analisis

A. Pengujian Asumsi Klasik :

Uji asumsi klasik merupakan pra syarat analisis regresi berganda. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka yang diajukan dalam penelitian adalah melakukan pengujian asumsi klasik meliputi : Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

B. Analisis Regresi Linier Berganda :

Metode selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Algifari (2000:62) menyatakan : Persamaan regresi berganda mengandung makna bahwa dalam suatu persamaan regresi terdapat satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Semakin banyak

variabel independen yang terlibat, dalam suatu persamaan regresi, maka semakin rumit menentukan nilai statistik yang diperlukan hingga diperoleh persamaan regresi estimasi. Selanjutnya akan dilakukan beberapa pengujian statistik lainnya sebagai berikut :

1. Uji Koefisien Korelasi (R) :

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, jika nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya jika nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Nilai R terletak antara -1 dan +1 atau $-1 \leq R \leq +1$.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2) :

Dalam regresi linear berganda, analisis determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model yang dapat menjelaskan variasi variabel dependen.

3. Uji Simultan/Analisis Varians (Uji F)

Uji F digunakan untuk menganalisa pengaruh seluruh variabel bebas, secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikatnya. Uji F ini membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada tingkat keyakinan tertentu untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya dampak atau pengaruh secara nyata antar variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

4. Uji Signifikansi / Uji t (t *test*) :

Uji t (uji parsial) ini dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dalam hal ini adalah untuk melihat signifikansi dari masing-masing variabel Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap variabel Belanja Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya terdistribusi normal, mendekati normal atau tidak.

Gambar 1
Hasil Output SPSS Uji Normalitas
Grafik Normal P-P Plot Variabel X_1 (Dana Bagi Hasil Pajak)

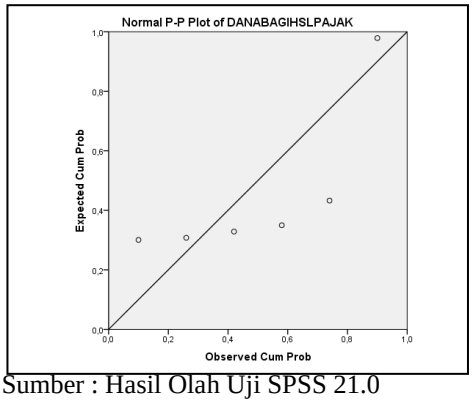

Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0

Gambar 2
Hasil Output SPSS Uji Normalitas
Grafik Normal P-P Plot Variabel X_2
(Dana Bagi Hasil Bukan Pajak)

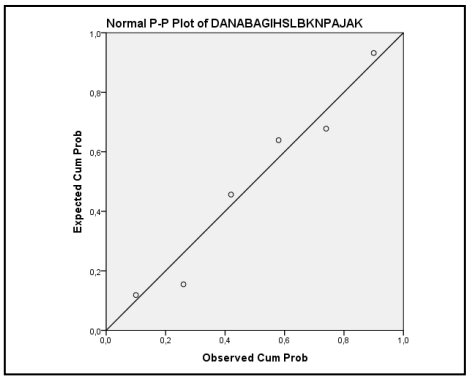

Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0

Gambar 3
Hasil Output SPSS Uji Normalitas
Grafik Normal P-P Plot Variabel X_3 (Dana Alokasi Umum)

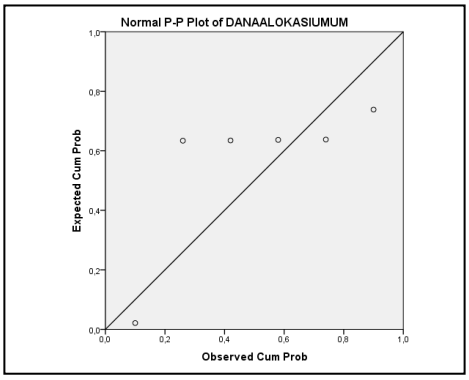

Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0

Gambar 4
Hasil Output SPSS Uji Normalitas
Grafik Normal P-P Plot Variabel X_4 (Dana Alokasi Khusus)

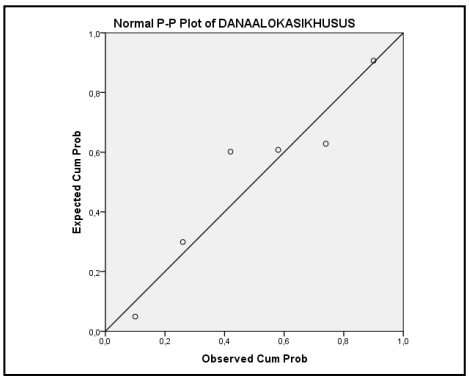

Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0

Gambar 5
Hasil Output SPSS Uji Normalitas
Grafik Normal P-P Plot Variabel Y (Belanja Daerah)

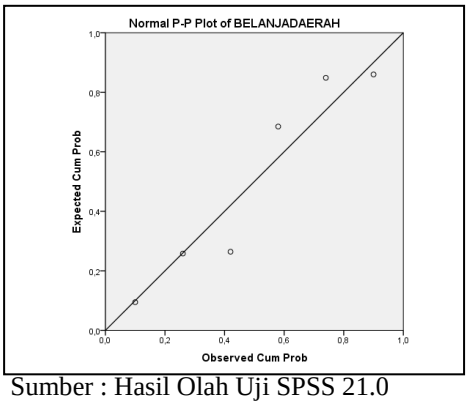

Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0

Berdasarkan tampilan grafik Normal P-Plot dari kelima variabel independen dan dependen tersebut ternyata gambar distribusi dengan titik-titik data mengalami penyebaran di sekitar garis diagonal serta penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Hal ini mengandung pengertian bahwa model regresi menunjukkan pola terdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas.

Dalam uji normalitas residual dengan grafik masih dapat menyesatkan apabila tidak hati-hati karena secara visual kelihatan normal. Oleh sebab itu untuk melengkapi dan mempertajam uji grafiknya, maka perlu juga dilakukan uji statistik lain untuk menguji normalitas residual yaitu menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebagaimana dapat ditampilkan melalui tabel berikut ini :

Tabel 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		DANA BAGI HSL PAJAK	DANA BAGI HSL BKN PAJAK	DANA ALOKASI UMUM	DANA ALOKASI KHUSUS	BELANJA DAERAH
N		6	6	6	6	6
Normal Parameters[a,b]	Mean	27,551733	29,069817	21,101783	23,769333	29,688050
	Std. Deviation	,6609711	,1496705	10,4087040	1,8212349	,3384918
Most Extreme Differences	Absolute	,401	,179	,467	,268	,236
	Positive	,401	,179	,262	,205	,236
	Negative	-,301	-,139	-,467	-,268	-,185
Kolmogorov-Smirnov Z		,981	,437	1,144	,658	,577
Asymp. Sig. (2-tailed)		**,291**	**,991**	**,146**	**,780**	**,893**

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* (K-S) di atas bahwa seluruh variableel (independen dan dependen) menghasilkan nilai angka probabilitas di atas 0,05 (>0,05) maka dapat dikatakan bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variable bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilakukan dengan cara melihat *tolerance value* atau nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* tidak lebih dari 10, maka model terbebas dari multikolinearitas. Berikut hasil pengujian multikolinearitas :

Tabel 2
Hasil Output SPSS Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	DANA BAGI HSL PAJAK	,128	7,782
	DANA BAGI HSL BKN PAJAK	,182	5,488
	DANA ALOKASI UMUM	,175	5,722
	DANA ALOKASI KHUSUS	,121	8,250

Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0

Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel independen yang mempunyai nilai tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF yang lebih besar dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskesdatisitas atau dapat dikatakan yang terjadi homoskedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen), yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Suatu model dinyatakan terjadi heteroskedastisitas atau tidak apabila :

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah **terjadi heteroskedastisitas**.

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka **tidak terjadi heteroskedastisitas**.

Berikut grafik hasil pengujian heteroskedastisitas :

Gambar 6
Grafik Scatterplot Variabel Dependen Y
(Belanja Daerah)

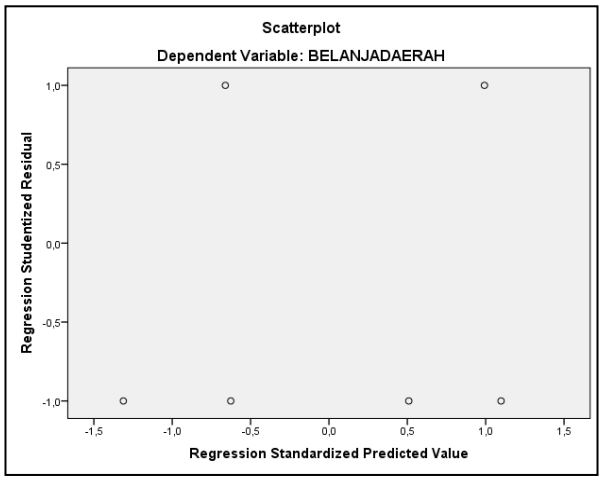

Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0

Berdasarkan gambar 6, dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada tidak membentuk pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Selain menggunakan *scatterplot*, uji heteroskedastisitas juga menggunakan pengujian statistik lainnya. Uji statistik yang dimaksud penelitian ini adalah uji Glejser, dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai *absolute residual*-nya. Apabila nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute > 0,05 (lebih dari 0,05), maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji Glejser-nya :

Tabel 3
Hasil Output SPSS Uji Glejser

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,449	,778		-1,862	**,314**
	DANABAGIHSLPAJAK	,007	,006	,943	1,103	**,469**
	DANABAGIHSLBKNPAJAK	,047	,024	1,443	2,009	**,294**
	DANAALOKASIUMUM	,000	,000	-,626	-,854	**,550**
	DANAALOKASIKHUSUS	-,004	,002	-1,645	-1,869	**,313**

a. Dependent Variable: RES2

Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai signifikan seluruh variabel independen menunjukkan nilai lebih besar dari 0,05 (> 0,05), maka dapat dijelaskan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Prasyarat yang harus terpenuhi dalam uji ini adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang dapat digunakan adalah dengan uji Durbin Watson. Hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin Watson (Uji DW) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Hasil Output SPSS Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,656[a]	,430	,414	1,385	**3,405**

a. Predictors : (Constant), DANABAGIHSLPAJAK, DANABAGIHSLBKNPAJAK, DANAALOKASIUMUM, DANAALAOKASIKHUSUS
b. Dependent Variable: BELANJADAERAH
Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat bahwa angka / nilai Durbin Watson (DW) sebesar 3,405 dengan nilai (dL) sebesar 0,2957 dan nilai (dU) sebesar 2,5881 sehingga dapat dihitung sebagai berikut : DW > 4-dU (3,405 > 1,4119) maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terjadi autokorelasi.

B. Analisis Regresi Linier Berganda

Uji ini digunakan untuk meramalkan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variable terikat untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kausal dua atau lebih variabel bebas yaitu Dana Bagi Hasil Pajak (X_1), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3), dan Dana Alokasi Khusus (X_4) terhadap satu variabel terikat, yaitu Belanja Daerah (Y). Berikut hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 21.0 *for windows* :

Tabel 5
Hasil Output SPSS Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	41,492	4,096		10,129	,063
	DANA BAGI HSL PAJAK	,504	,033	,984	15,099	,042
	DANA BAGI HSL BKN PAJAK	2,244	,124	,992	18,130	,035
	DANA ALOKASI UMUM	-,011	,002	-,326	-5,832	,108
	DANA ALOKASI KHUSUS	-,324	,012	-1,743	-25,978	,024

a. Dependent Variable : BELANJA DAERAH
Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan ke dalam persamaan fungsi analisis regresi linear berganda, yaitu sebagai berikut :

$$\mathbf{Y = 41{,}492 + 0{,}504X_1 + 2{,}244X_2 - 0{,}011X_3 - 0{,}324X_4}$$

Bunyi interprestasi dari persamaan fungsi analisis regresi linear berganda di atas dapat diperoleh melalui penjelasan secara rinci berikut :

1. Nilai konstanta sebesar 41,492 artinya ketika variabel Dana Bagi Hasil Pajak (X_1), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3), dan Dana Alokasi Khusus (X_4) dianggap konstan atau tidak ada perubahan, maka besarnya efektivitas Belanja Daerah (Y) adalah sebesar 41,492.

2. Variabel Dana Bagi Hasil Pajak (X_1) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,504 artinya bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel Dana Bagi Hasil Pajak (X_1), maka efektivitas Belanja Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,504 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tidak berubah atau konstan.

3. Variabel Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (X_2) mempunyai nilai koefisien sebesar 2,244 yang memiliki arti bahwa setiap peningkatan 1 satuan variabel Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (X_2), mengakibatkan efektivitas Belanja Daerah (Y) akan meningkat/naik sebesar 2,244 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tidak berubah atau konstan.

4. Variabel Dana Alokasi Umum (X_3) mempunyai nilai koefisien sebesar -0,011 yang artinya bahwa apabila terjadi kenaikan 1 satuan variabel Dana Alokasi Umum (X_3), maka mengakibatkan efektivitas Belanja Daerah (Y) akan turun sebesar 0,011 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tidak berubah atau konstan.

5. Variabel Dana Alokasi Khusus (X_4) mempunyai nilai koefisien sebesar -0,324 yang artinya bahwa apabila terjadi kenaikan 1 satuan variabel Dana Alokasi Khusus (X_4), maka mengakibatkan efektivitas Belanja Daerah (Y) akan turun sebesar 0,324 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain tidak berubah atau konstan.

Dari hasil persamaan di atas, dengan tingkat keyakinan yang dipergunakan adalah 95% dan taraf kesalahan 5% selanjutnya akan dilakukan beberapa pengujian statistik lainnya, sebagai berikut :

1. Hasil Uji Koefisien Korelasi (R)

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. Hasil pengujian koefisien korelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Hasil Output SPSS Uji Koefisien Korelasi (R)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	**1,000**[a]	,999	,997	0,0176786

a. Predictors : (Constant), DANA BAGI HSL PAJAK, DANA BAGI HSL BUKAN PAJAK, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS
b. Dependent Variable: BELANJA DAERAH
Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 1,000. Apabila dilihat dari nilai interval koefisien korelasi tingkat 0,80 – 1,000 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan tingkat korelasi yang sangat kuat antara variabel variabel Dana Bagi Hasil Pajak (X_1), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3), dan Dana Alokasi Khusus (X_4) terhadap variabel Belanja Daerah (Y).

2. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi (R^2) digunakan untuk menganalisis determinasi dalam regresi linier berganda. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi (R^2) :

Tabel 7
Hasil Output SPSS Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	1,000[a]	,999	**,997**	0,0176786

a. Predictors : (Constant), DANA BAGI HSL PAJAK, DANA BAGI HSL BUKAN PAJAK, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS
b. Dependent Variable: BELANJA DAERAH
Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0

Berdasarkan tabel 7 diperoleh nilai Adjusted R Square atau koefisien determinasi sebesar 0,997. Hal ini berarti bahwa variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak (X_1), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3), dan Dana Alokasi Khusus (X_4) memiliki pengaruh sebesar 99,7% terhadap variabel Belanja Daerah (Y) dan sisanya 0,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model dalam penelitian ini.

3. Hasil Uji Variance Simultan (Uji F/ F-Test)

Uji F digunakan untuk menganalisa pengaruh seluruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikatnya sehingga dapat diketahui apakah variabel-variabel tersebut dapat diterima atau ditolak. Hasil pengujian ini dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 8
Hasil Output SPSS Uji Simultan (Uji F)
ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,573	4	,143	**458,008**	,035[b]
	Residual	,000	1	,000		
	Total	,573	5			

a. Dependent Variable: BELANJA DAERAH
b. Predictors: (Constant), DANA ALOKASI KHUSUS, DANA ALOKASI UMUM, DANA BAGI HSL BKN PAJAK, DANA BAGI HSL PAJAK
Sumber : Hasil Olah Uji SPSS 21.0

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, apabila dilihat pada tabel 8 diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah sebesar 458,008. Jika dibandingkan dengan nilai F_{tabel}, yaitu sebesar 224,583 maka nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ (458,008 > 224,583) dan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,035 < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan dan signifikan antara variabel independen/ bebas, yaitu Dana Bagi Hasil Pajak (X_1), Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (X_2), Dana Alokasi Umum (X_3), dan Dana Alokasi Khusus (X_4) terhadap variabel dependen/terikat, yaitu Belanja Daerah (Y).

4. Hasil Uji Signifikansi (Uji t/ t-Test)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil output SPSS yang ditampilkan pada tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} dari masing-masing variabel. Pengujian selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengujian variabel Dana Bagi Hasil Pajak (X_1) :

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data sebagaimana tabel 5 maka diperoleh t_{hitung} sebesar 15,099 dengan nilai sig. sebesar 0,042. Dengan demikian H_o ditolak karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ (15,099 > 12,706) dan nilai sig. 0,042 < 0,05 sehingga dinyatakan bahwa secara parsial variabel Dana Bagi Hasil Pajak (X_1) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y).

b. Pengujian variabel Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (X_2) :

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data sebagaimana tabel 5 maka diperoleh t_{hitung} sebesar 18,130 dengan nilai sig. sebesar 0,035. Dengan demikian H_o ditolak karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ (18,130 > 12,706) dan nilai sig. 0,035 < 0,05 sehingga dinyatakan bahwa secara parsial variabel Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (X_2) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y).

c. Pengujian variabel Dana Alokasi Umum (X_3) :

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data sebagaimana tabel 5 maka diperoleh t_{hitung} sebesar -5,832 dengan nilai sig. sebesar 0,108. Dengan demikian H_o diterima karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-5,832 < 12,706) dan nilai sig. 0,108 > 0,05 sehingga dinyatakan bahwa secara parsial variabel Dana Alokasi Umum (X_3) tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variabel Belanja Daerah (Y).

d. Pengujian variabel Dana Alokasi Khusus (X_4) :

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis data sebagaimana tabel 5 maka diperoleh t_{hitung} sebesar -25,978 dengan nilai sig. sebesar 0,024. Dengan demikian H_o diterima karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-25,978 < 12,706) tetapi nilai sig. 0,024 < 0,05 sehingga dinyatakan bahwa secara parsial variabel Dana Alokasi Khusus (X_4) terdapat pengaruh yang signifikan yang negatif terhadap variabel Belanja Daerah (Y).

Pembahasan Hasil Penelitian

A. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Secara simultan atau bersama-sama variabel Dana Bagi Hasil Pajak, variabel Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, variabel Dana Alokasi Umum, dan variabel Dana Alokasi Khusus dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kebutuhan Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan. Kebutuhan pembiayaan daerah belum sepenuhnya dapat ditopang melalui sumber pendapatan daerah itu sendiri (Pendapatan Asli Daerah), hal ini sejalan dengan semangat Otonomi Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Daerah

Secara parsial variabel Dana Bagi Hasil Pajak (X_1) dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa Dana Bagi Hasil Pajak sebagai bagian dari Dana Perimbangan, berasal dari daerah melalui pemungutan Pajak Penghasilan (dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (dari transaksi Barang dan/atau Jasa Kena Pajak) yang disetorkan ke Kas Negara. Selanjutnya penerimaan tersebut dikembalikan kepada daerah penghasil sebagai Dana Perimbangan berdasarkan perhitungan Undang-Undang dan digunakan oleh daerah untuk kebutuhan Belanja Daerah-nya.

C. Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Belanja Daerah

Secara parsial variabel Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (X_2) dalam penelitian ini memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebagai bagian dari Dana Perimbangan yang berasal dari daerah dan bersumber dari : penerimaan kehutanan, pertambangan umum, penerimaan perikanan, serta penerimaan pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi. Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar dari sektor tersebut di atas, tentunya penerimaan kembali Dana Perimbangan tersebut sangat diharapkan perhatian Pemerintah Pusat agar percepatan dan kelancaran pembangunan sarana dan prasarana segera terwujud, mengingat wilayah Kalimantan Timur yang cukup luas.

D. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Secara parsial variabel Dana Alokasi Umum (X_3) dalam penelitian ini tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa Dana Alokasi Umum yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke daerah sebagian besar digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai (belanja gaji Pegawai Negeri Sipil di daerah), karena sesuai amanat Otonomi Daerah dimana penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen sejak era reformasi telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sehingga memberikan beban kepada daerah yang akhirnya menyerap pembiayaan yang tidak sedikit.

E. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Secara parsial variabel Dana Alokasi Khusus (X_4) dalam penelitian ini mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa selain Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), dan Dana Alokasi Umum yang menjadi hak daerah, maka Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peruntukannya dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional guna menopang Belanja Daerah bagi daerah provinsi/kabupaten/kota.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat dipetik dalam penelitian ini adalah :

1. Belanja Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lebih banyak ditopang dari transfer pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, karena kebutuhan pembiayaan daerah belum sepenuhnya dapat ditopang melalui sumber pendapatan daerah itu sendiri (Pendapatan Asli Daerah), hal ini sejalan dengan semangat Otonomi Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Dana Bagi Hasil Pajak berasal dari daerah melalui pemungutan Pajak Penghasilan (dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan) dan Pajak Pertambahan Nilai (dari transaksi Barang dan/atau Jasa Kena Pajak) yang disetorkan ke Kas Negara. Selanjutnya penerimaan tersebut dikembalikan kepada daerah penghasil sebagai Dana Perimbangan berdasarkan perhitungan undang-undang dan digunakan oleh daerah untuk kebutuhan Belanja Daerah-nya.

3. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang berasal dari daerah bersumber dari: penerimaan kehutanan, pertambangan umum, penerimaan perikanan, serta penerimaan pertambangan minyak bumi, gas bumi dan panas bumi. Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki sumber daya alam yang cukup besar dari sektor tersebut di atas, tentunya penerimaan kembali Dana Perimbangan tersebut sangat diharapkan perhatian Pemerintah Pusat agar percepatan dan kelancaran pembangunan sarana dan prasarana segera terwujud, mengingat wilayah Kalimantan Timur yang cukup luas.

4. Dana Alokasi Umum yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke daerah sebagian besar digunakan untuk membiayai Belanja Pegawai (belanja gaji Pegawai Negeri Sipil di daerah), karena sesuai amanat Otonomi Daerah dimana penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen sejak era reformasi telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sehingga memberikan beban kepada daerah yang akhirnya menyerap pembiayaan yang tidak sedikit.

5. Selain Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam), dan Dana Alokasi Umum yang menjadi hak daerah, maka Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peruntukannya dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional guna menopang Belanja Daerah bagi daerah provinsi/kabupaten/kota.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka beberapa saran yang diajukan yaitu :

1. Dana Bagi Hasil memberikan kontribusi atau pengaruh yang kuat terhadap belanja daerah pada provinsi Kalimantan Timur, sehingga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk membiayai pengeluaran daerah dalam hal ini belanja daerahnya.

2. Pemerintah provinsi Kalimantan Timur diharapkan lebih mandiri mengingat tingginya ketergantungan terhadap besarnya transfer Dana Alokasi Umum maka untuk mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah harus mengupayakan dan memaksimalkan potensi daerah sehingga berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah seperti mendorong kinerja industri pariwisata, agro industri, jasa, perikanan, dan sektor ekonomi lainnya yang potensial untuk dikembangkan.

3. Untuk merealisasikan semangat desentralisasi dan prinsip otonomi daerah, maka pemerintah provinsi Kalimantan Timur dituntut untuk lebih mandiri sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Afifudin dan Saebani. 2009. *Methode Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Algifari. 2000. *Analisis Regresi Teori, Kasus, dan Solusi*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS.*Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

_____, 2009. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS,* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

_____, 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi 7. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah,* Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.

_____, Abdul. 2009. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah* (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578).

Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).* Bandung : Alfabeta.

_____. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan ke 3. Bandung : Alfabeta.

Suharyadi dan Purwanto S.K. 2009. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern* Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.

Sujarweni, Wiratna. 2014. *SPSS untuk Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Umar, Husein. 2005. *Riset Pemasaran dan Prilaku Konsumen.* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

_____, 2010. *Desain Penelitian MSDM dan Perilaku Karyawan Paradigma Positivistik dan Berbasis Pemecahan Masalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).